

# ANALISIS KEBIJAKAN HASIL UJIAN NASIONAL SMA/MA UNTUK MEMETAKAN TINGKAT KOMPETENSI SISWA DAN MUTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

**Gazali Lembah, Andi Tanra Tellu, Juraid, Asep Mahpudz, Haeruddin**

Dosen FKIP Universitas Tadulako

**Abstrak:** Penelitian Pemetaan Mutu Pendidikan pada Jenjang SMA dilaksanakan di Propinsi Sulawesi Tengah yang berlangsung selama enam bulan yaitu dari Juli sampai Desember 2011. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan kompetensi siswa SMA pada setiap mata pelajaran yang diujikan dalam Ujian Nasional; Mengungkap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap rendahnya pencapaian SK/KD setiap mata pelajaran yang diujikan dalam Ujian Nasional; Menemukan model alternatif pemecahan masalah rendahnya pencapaian SK/KD setiap mata pelajaran yang diujikan dalam Ujian Nasional; dan Merumuskan model implementasi pemecahan permasalahan rendahnya pencapaian SK/KD setiap mata pelajaran yang diujikan dalam Ujian Nasional. Penelitian ini adalah penelitian replikasi yang terdiri dari 6 kelompok di tingkat kabupaten/kota dan 1 (satu) kelompok ditingkat Provinsi. Desain penelitian dilakukan secara kualitatif-deskriptif dan studi kebijakan. Populasi dalam penelitian ini adalah semua SMA di Provinsi Sulawesi Tengah. Sampel SMA di masing-masing Kabupaten sebanyak 5 sekolah. Instrumen yang digunakan adalah *soft ware* olah data hasil UN, tes pelacakan kompetensi guru, panduan interviu, kuesioner dan lembar observasi. Data dianalisis dengan teknik analisis kualitatif dengan pendekatan teoretik dan triangulasi. Desain model pemecahan masalah disajikan secara kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah: peta kompetensi siswa SMA yang pencapaiannya SK/KD UN tergolong rendah di Tingkat Provinsi. Faktor yang berpengaruh dalam pencapaian kompetensi siswa adalah kemampuan guru mengembangkan perangkat pembelajaran, sarana dan prasarana yang belum memadai, dan pembiayaan sistem monitoring dan evaluasi di kelas. Model alternatif pemecahan masalah antara lain melalui optimalisasi peran MGMP yang berfokus pada peningkatan kapasitas guru dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran, *Lesson Study*, pendampingan penyusunan perangkat pembelajaran dan Bimtek penyusunan tes setara UN; dan Model implementasi pemecahan masalah mencakup kegiatan perencanaan bersama di Dinas Pendidikan dan revitalisasi peran MGMP dengan dukungan Perguruan Tinggi melalui pengabdian kepada masyarakat.

**Kata Kunci:** Pemetaan, Ujian Nasional SMA, Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar, Pengembangan Mutu Pendidikan.

Ujian Nasional merupakan salah satu komponen penentu kelulusan siswa pada setiap jenjang pendidikan dasar dan menengah. Walaupun bukan lagi merupakan satu-satunya penentu kelulusan siswa, namun nilai UN menjadi penting untuk dikaji lebih jauh sebagai salah satu indikator penentuan kualitas pendidikan. Berdasarkan data yang diperoleh, hasil UN dalam tiga tahun terakhir menunjukkan variasi yang sangat berbeda, baik antarbidang studi maupun antardaerah, begitupun dengan antarsekolah. Hal itu terjadi pula di Sulawesi Tengah.

Pelaksanaan UN selama ini mendapat berbagai tantangan dan kendala, baik dari segi teknis pelaksanaan maupun substansinya sebagai penentu kelulusan siswa. Hal ini berdampak negatif kepada teknis pelaksanaannya di lapangan, terutama banyaknya upaya yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam rangka mencari peluang agar siswa dapat lulus dengan baik. Walaupun hal ini kadang sulit dibuktikan secara empiris.

Selanjutnya, data tahun 2011 daerah dengan jumlah terbanyak siswa yang tidak lulus

adalah Sulawesi Tengah, dengan persentase 4,3 persen, atau 369 siswa, dari 7.634 yang ikut Ujian Nasional. Data ini menjadikan Provinsi Sulawesi Tengah masuk dalam kategori 10 terburuk di tingkat Nasional (<http://indonews.org>).

Sebagai ilustrasi, disajikan rangkuman kondisi hasil UN dalam 3 (tiga) tahun terakhir (2008 - 2010) berdasarkan bidang studi dan kabupaten/kota seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Nilai rata-rata hasil ujian nasional dalam tiga tahun terakhir

Mata Pelajaran	Banggai	Bangkep	Buol	Donggala	Morowali	Palu	Parigi	Poso	Sigi	Tojo Una-una	Toihiti	Rata-rata
Bahasa Indonesia	6.04	5.96	5.83	6.06	5.83	6.02	5.44	5.99	6.08	5.57	5.64	5.84
Antropologi	6.51	6.15	-	-	6.13	5.98	4.78	5.72	5.69	5.71	5.97	5.87
Sosiologi	6.13	6.15	5.60	6.00	5.87	5.87	5.83	5.68	5.91	5.22	6.52	5.89
Biologi	6.70	6.14	5.90	5.84	5.66	6.36	5.87	6.00	6.44	5.13	6.47	6.02
Sastra	6.34	5.74	-	-	6.56	6.44	5.50	6.05	6.09	6.02	5.85	6.07
Geografi	6.14	6.34	5.87	6.17	5.68	6.58	6.09	6.04	6.56	5.74	6.03	6.08
Bahasa Inggris	6.99	6.55	6.12	6.09	5.79	6.47	5.71	6.04	6.27	5.31	6.22	6.15
Ekonomi	6.33	6.61	6.16	6.35	5.83	6.93	6.40	6.21	5.99	6.07	6.79	6.36
Matematika	6.85	6.59	6.44	6.89	6.00	7.02	6.05	6.02	6.77	5.45	6.88	6.43
Fisika	7.20	6.14	6.72	6.57	6.66	7.35	6.39	6.81	6.95	6.69	6.84	6.74
Bahasa Asing	7.64	7.16	-	-	6.26	7.99	6.49	6.76	8.02	4.19	6.69	6.81
Kimia	7.64	6.90	7.21	7.48	6.84	7.93	7.28	7.52	7.30	6.23	7.85	7.29
<b>Rata-rata</b>	<b>6.68</b>	<b>6.37</b>	<b>6.19</b>	<b>6.37</b>	<b>6.02</b>	<b>6.67</b>	<b>5.90</b>	<b>6.16</b>	<b>6.46</b>	<b>5.58</b>	<b>6.40</b>	<b>6.25</b>

Sumber (Aplikasi Puspendik)

Mengacu pada data di atas perlu usaha untuk meningkatkan nilai UN, baik pada tingkat kabupaten maupun provinsi. Peningkatan dapat dilakukan dengan mengkaji kompetensi/kompetensi dasar yang belum dikuasai oleh siswa dan faktor yang berpengaruh terhadap hasil UN. Faktor tersebut berupa sistem manajemen, guru, sarana dan prasarana pendidikan, dan budaya masyarakat.

Penelitian ini memetakan penguasaan kompetensi mata pelajaran dalam Ujian Nasional dan mencari faktor penyebab siswa SMA belum menguasai standar kompetensi/kompetensi dasar di Provinsi Sulawesi Tengah ditinjau dari segi sistem manajemen, guru, sarana dan prasarana pendidikan, dan budaya masyarakat. Dari faktor penyebab ini kemudian disusun model alternatif pemecahan masalah rendahnya hasil ujian

nasional siswa SMA di Provinsi Sulawesi Tengah.

## KAJIAN PUSTAKA

### Mutu Pendidikan

Mutu pendidikan dapat didefinisikan sebagai tingkat pemenuhan standar-standar nasional pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan oleh penyelenggara pendidikan. Semakin tinggi tingkat pemenuhan penyelenggara pendidikan terhadap standar-standar nasional, semakin tinggi mutu pendidikan pada tingkat penyelenggara tersebut.

Butir-butir standar dari masing-masing aspek standar nasional cukup banyak. Untuk keperluan pemetaan mutu pendidikan ini, hanya butir-butir yang esensial yang dicakup yang datanya dapat dikumpulkan. Untuk keperluan

pendataan mutu yang lebih komprehensif cakupan butir/indikator harus diperluas.

Aspek yang terkait dengan mutu pendidikan dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu input, proses, dan produk. Indikator mutu pendidikan nasional lebih diarahkan pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan sekolah.

**Indikator Mutu Pendidikan yang Perlu Ditetapkan**

- Penyelenggara pendidikan meliputi penyelenggara pada tingkat sekolah (satuan pendidikan), kabupaten/kota, provinsi, dan pusat.
- Indikator mutu pendidikan untuk masing-masing tingkat penyelenggara perlu ditetapkan.
- Penyelenggara pada tingkat yang lebih tinggi memiliki cakupan tupoksi yang lebih luas, dan oleh karenanya cakupan indikator mutunya juga lebih luas.
- Pada dasarnya indikator-indikator yang dicakup oleh penyelenggara pada tingkat di bawah juga merupakan indikator-indikator bagi mutu pendidikan pada penyelenggara tingkat di atasnya.
- Butir-butir standar dari masing-masing aspek standar nasional cukup banyak. Untuk keperluan pemetaan pendidikan hanya butir-butir yang esensial yang dicakup.
- Aspek yang terkait dengan mutu pendidikan dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu input, proses, dan produk.

KOMPONEN	ASPEK
Input	Isi, pendidik/tenaga kependidikan, sarana/prasarana, pembiayaan
Proses	Pembelajaran, penilaian
Produk	Lulusan

**Kebijakan Pendidikan di Daerah**

Sejak tahun 2001 otonomi daerah di Indonesia berlakukan. Sampai saat ini, otonomi pendidikan sebagai salah satu bagian dari otonomi daerah itu sendiri sudah digulirkan, meskipun belum dirasakan optimal. Secara

filosofi-sosiologis, kebijakan desentralisasi pendidikan merupakan pilihan strategis bagi pembangunan pendidikan di masa depan. Dalam konteks ini, pemerintah pusat melalui Depdiknas hanya bertanggung jawab merumuskan garis-garis kebijakan umum, antara lain : mendesain kurikulum, membuat standarisasi mutu, mementukan kualifikasi guru, menyelenggarakan ujian nasional, dan menetapkan model evaluasi.

Dengan era otonomi daerah, selayaknya para pakar pendidikan, praktisi, dan pengamat pendidikan untuk bersama-sama memberdayakan pendidikan nasional. Hal ini penting karena masih banyak permasalahan pendidikan dan kualitas sumber daya manusia yang masih belum terpecahkan. Kebijakan desentralisasi pendidikan mengharuskan diperkuatnya landasan dasar pendidikan yang lebih demokratis, transparan, efisien, dan melibatkan partisipasi masyarakat daerah.

Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk dapat mengimplementasikan kebijakan pendidikan di daerah adalah diberlakukannya manajemen pendidikan berbasis pada sekolah (school based education) dan model perencanaan dari bawah (bottom up planning). Dalam menghadapi kecendrungan merosotnya pencapaian hasil pendidikan selama ini, langkah antisipatif yang dapat ditempuh adalah mengupayakan peningkatan partisipasi masyarakat terhadap dunia pendidikan, peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan, serta perbaikan manajemen di setiap jenjang, jalur, dan jenis pendidikan.

Dengan digulirnya otonomi pendidikan yang merupakan salah satu kewenangan esensial daerah, peluang besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang merupakan tolak ukur kualitas sumber daya manusia di daerah telah terbuka. Hal ini terjadi karena walikota/bupati melalui dinas pendidikan saat ini memiliki kewenangan penuh dalam menentukan kualitas pendidikan di daerahnya, baik melalui sistem penerimaan siswa, pembinaan profesionalisme guru, rekrutmen kepala sekolah, penentuan sistem evaluasi, dan sebagainya. Dalam konteks ini, akan dibutuhkan komitmen, visi, dan misi daerah untuk terus meningkatkan kualitas sesuai

dengan harapan yang tentunya perlu pengkajian ulang sistem yang digunakan sebelumnya.

Paradigma selama ini telah mengisyaratkan bahwa sistem pendidikan yang dilaksanakan masih menyimpan berbagai kelemahan. Dengan otonomi pendidikan, daerah akan semakin leluasa untuk menentukan sistem pendidikan yang akan diterapkan di daerahnya. Namun, dalam menyingkapi realitas ini, daerah tidak perlu terlalu berlebihan dengan mengesampingkan program nasional. Dalam arti bahwa sistem yang digunakan di daerah, tetap mengacu pada program nasional yang tercermin, dalam empat strategi dasar pendidikan nasional yaitu pemerataan pendidikan, peningkatan mutu, efisiensi, dan relevansi.

### **Metode dan Subyek Penelitian**

Pemetaan persebaran tingkat kualitas lulusan SMA di Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan nilai UN dilakukan melalui penelitian dengan metode deskriptif di Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

### **Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SMA, baik negeri maupun swasta dalam wilayah Sulawesi Tengah. Subyek penelitian adalah guru, masyarakat, siswa yang telah menamatkan pendidikannya di SMA. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik sampling purposif dikombinasi sampel klaster dan kuota.

### **Jenis dan Sumber Data**

1. Jenis data, terdiri dari:
  - 1) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dinas/instansi terkait, meliputi:
    - a) Jumlah SMA se Sulawesi Tengah
    - b) Data kelulusan siswa 3 (tiga) tahun terakhir
    - c) Kompetensi/kompetensi dasar setiap mata pelajaran yang belum mencapai ketuntasan minimal 60%.
  - 2) Data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari sekolah dan responden
    - a) Permasalahan yang dihadapi guru dalam melaksanakan pembelajaran

- b) Permasalahan yang dialami oleh siswa dalam mengerjakan soal-soal UN
- c) Sarana dan prasarana pendidikan
- d) Implementasi komponen standar pendidikan

### **2. Sumber data:**

- 1) Kepala Dinas/Kepala kantor dari semua instansi terkait
- 2) Kepala Sekolah
- 3) Guru
- 4) Siswa
- 5) Tokoh masyarakat/informan kunci
- 6) Pemerhati Pendidikan

### **Prosedur Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik, antara lain:

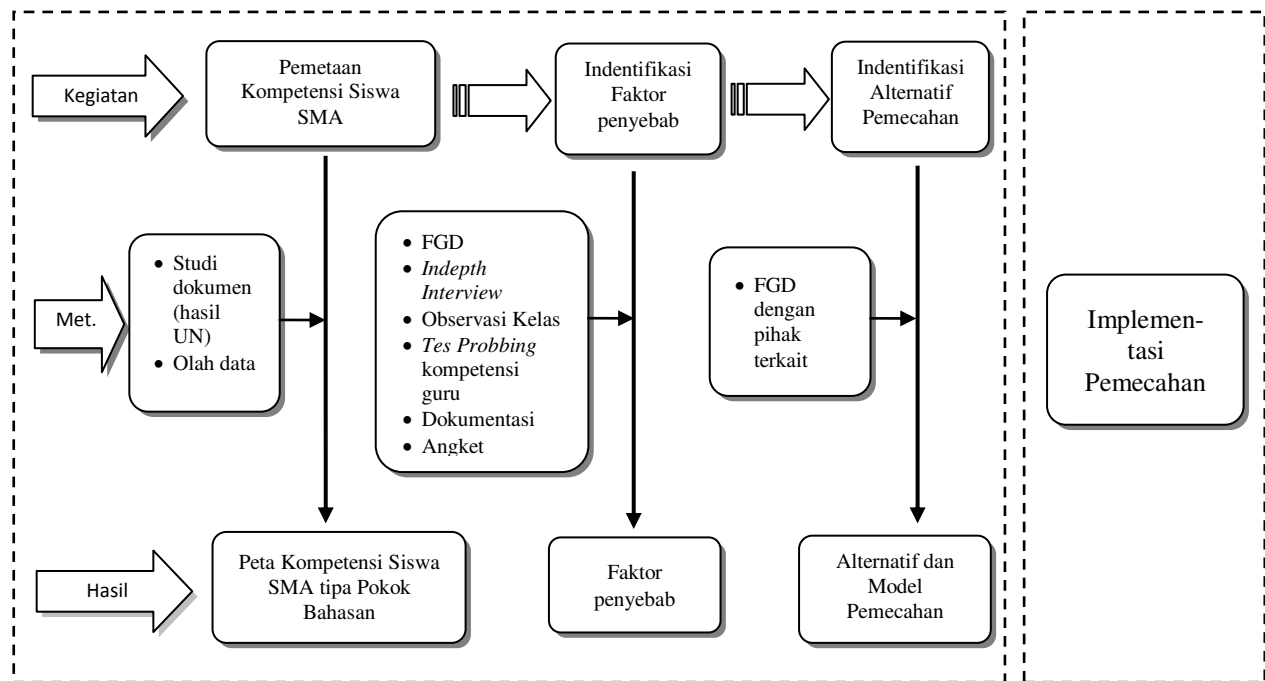
1. Teknik angket, menggunakan format borang (quesioner)
2. Teknik wawancara, menggunakan pedoman wawancara (wawancara tertutup) dan wawancara terbuka.
3. Interview mendalam (*dept interveiw*), wawancara secara mendalam beberapa informan kunci / tokoh-tokoh kunci dalam bidang pendidikan.
4. *Focus Group Discussion* (FGD), dilakukan untuk memperoleh data yang lebih akurat dari tokoh-tokoh kunci.
5. Tes *Probbing* kompetensi kemampuan guru, dilakukan untuk mengakaji pemahaman guru terhadap kompetensi/kompetensi dasar setiap pokok bahasan.
6. Pengamatan langsung, kegiatan yang dilaksanakan dengan mengamati secara langsung obyek yang diteliti.

### **Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Analisis data dilakukan dengan pendekatan analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program pengolahan data (SPSS dan Excel) menggunakan komputer.

### **Parameter Pengamatan**

Parameter pengamatan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP), berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005.



Gambar 1. Diagram alir pelaksanaan penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data peta kemampuan yang diuji sebagaimana disajikan pada Lampiran A maka dapat dinyatakan bahwa terdapat SK/KD pada masing-masing mata pelajaran yang menunjukkan pencapaian yang sangat rendah, yaitu di bawah 20% atau bahkan di bawah 10%. Fenomena kompetensi siswa tersebut menampakkan bahwa tujuan pendidikan yang dicapai hanya masih sebatas penguasaan pengetahuan, belum menyentuh aspek lain, misalnya afektif dan psikomotor.

### Faktor Penyebab Rendahnya Hasil UN dan Alternatif Pemecahannya

#### a. Standar Isi

Standar isi berkaitan dengan penyiapan perangkat pembelajaran, seperti silabus, RPP, LKS, bahan ajar, dan media pembelajaran. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dan telaah dokumen sebagian besar guru tidak mengembangkan sendiri perangkat pembelajaran.

Sebagai contoh Silabus dan RPP tidak disusun oleh guru, guru hanya menggunakan silabus dan

RPP dari penerbit tertentu. Akibatnya media dan bahan yang tercantum dalam RPP tidak sesuai

dengan kondisi sekolah serta bahan dan peralatan yang diperlukan tidak tersedia. Dampaknya adalah pembelajaran menjadi tidak sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah dan fasilitas sekolah. Pembelajaran pun menjadi kegiatan yang tidak benar-benar mengacu pada RPP.

Mencermati keadaan ini perlu ada upaya yang serius dari pihak sekolah dan dinas pendidikan, serta perguruan tinggi untuk dapat memberikan motivasi dan arahan agar guru-guru mempunyai kemampuan dalam mengembangkan perangkat pembelajaran secara mandiri. Langkah-langkah yang dapat ditempuh adalah melakukan kegiatan lokarya pengembangan perangkat pembelajaran. Agar kegiatan ini dapat berjalan secara kontinu setiap tahun maka

pemerintah perlu mengalokasikan dana yang diperuntukkan dalam meningkatkan kompetensi guru dalam mengembangkan perangkat pembelajaran. Dalam kegiatan ini, dilibatkan perguruan tinggi sebagai narasumber dan fasilitator. Kegiatan ini diharapkan akan memotivasi guru-guru untuk selalu meningkatkan kemampuannya dan wawasannya dalam pengembangan perangkat pembelajaran yang inovatif.

Menghadapi dan mengatasi persoalan itu, alternatif pemecahan masalah yang direncanakan, yakni meningkatkan kualitas pengelolaan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP). Hal itu dilakukan melalui pendampingan LPTK terhadap para guru SMA ketika merancang dan menerapkan program kerja MGMP di sekolah guna mendukung pencapaian standar kompetensi lulusan (SKL). Dalam hal ini, LPTK akan melakukan koordinasi dengan sekolah, guru, pengawas, dan Dinas Pendidikan. Namun, sebelum program dilaksanakan, identifikasi permasalahan kurikulum akan diprioritaskan lebih dulu.

#### **b. Standar Proses**

Pembelajaran yang dilakukan guru mengacu pada RPP, namun jarang menggunakan media pembelajaran. Pemantauan oleh kepala sekolah dalam pembelajaran relatif kurang. Kemampuan guru-guru merancang pembelajaran dan menggunakan model-model pembelajaran inovatif masih perlu ditingkatkan. Kebanyakan Guru tidak menguasai IT, sehingga dalam pembelajaran guru tidak menggunakan IT.

Perkembangan teknologi di bidang informatika seperti sekarang ini sangat memungkinkan bagi guru-guru untuk memanfaatkannya untuk kepentingan pendidikan. Seperti untuk mengajak siswa mencari informasi materi pelajaran yang ditugaskan melalui internet, mengambil beberapa program simulasi untuk pembelajaran IPA. Fasilitas komputer dapat dimanfaatkan untuk menggantikan peralatan praktikum yang tidak tersedia di sekolah dengan menggunakan program animasi dan simulasi.

Kepala sekolah dapat juga memanfaatkan IT dalam memantau pembelajaran di setiap kelas

dengan menggunakan kamera CCTV. Kepala sekolah dapat memonitor dari ruangnya dan kegiatan setiap guru dapat direkam. Hasil rekaman ini bisa dijadikan alat evaluasi bagi guru-guru atas masukan dari kepala sekolah dalam perbaikan pembelajaran.

Berkaitan permasalahan ini dapat diberikan alternatif pemecahannya sebagai berikut: pertama-tama yang harus dilakukan adalah bagaimana supaya guru-guru menguasai IT. Kegiatan ini dapat dilakukan setiap tahun melalui lokakarya pemanfaatan IT dalam pembelajaran dan monitoring internal sekolah. Pembiayaan dapat dianggarkan oleh dinas pendidikan kabupaten. Dalam kegiatan ini diundang narasumber yang menguasai IT bidang pembelajaran. Dalam lokarya guru-guru dilatih merancang pembelajaran yang berbasis IT dan menyajikan hasil karyanya.

Selain guru-guru harus menguasai IT, juga harus dibekali kemampuan merancang pembelajaran dengan menerapkan model-model pembelajaran inovatif. Untuk dapat memotivasi guru-guru dalam merancang pembelajaran yang inovatif dapat dilaksanakan melalui Lesson study. Kegiatan Lesson study mengajak guru-guru untuk membuat perencanaan pembelajaran yang hasil rancangannya dibahas bersama teman sejawat, kemudian dalam pelaksanaannya diamati oleh guru-guru yang lainnya. Kegiatan selanjutnya, dilakukan refleksi bersama pengamat untuk memberikan masukan-masukan kepada pengajar sehingga pada kegiatan berikutnya bisa menjadi lebih baik. Jika kegiatan ini dilakukan secara rutin maka kemampuan guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran semakin meningkat. Terlebih lagi jika guru-guru ditunjang dengan kemampuan IT yang memadai, maka pembelajaran akan menjadi semakin berkualitas.

Kegiatan *Lesson Study* dapat diawali dengan melakukan lokakarya untuk mensosialisasikan dan memberikan pengetahuan tentang *lesson study* kepada guru-guru. Dinas pendidikan kabupaten dapat menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi yang telah melaksanakan *lesson study*.

Lokarya yang ditawarkan sifatnya tahunan, untuk kegiatan rutin dapat melalui MGMP. Dalam pertemuan MGMP guru-guru

dapat saling membantu dalam menggunakan IT, merancang pembelajaran, dan membahas kegiatan *lesson study*.

### c. Standar Kompetensi Lulusan

Berkaitan dengan proses pembelajaran, guru memegang peranan penting dalam memotivasi siswanya untuk belajar, berkarya dan mencari informasi dari berbagai sumber. Selain guru, maka tidak kalah pentingnya adalah ketersediaan fasilitas di sekolah dalam menunjang kegiatan belajar mengajar dan untuk mencari informasi melalui internet. Karena keterbatasan fasilitas maka siswa menjadi tidak terbiasa mencari informasi dari berbagai sumber, akibatnya wawasan pengetahuan siswa kurang dan siswa belajar hanya berdasarkan buku yang digunakan guru. Guru kurang melatih siswa untuk membuat karya kreatif dan siswa tidak terlatih membaca naskah secara sistematis, sehingga mereka kurang dapat memaknai bacaan dengan benar. Untuk memberdayakan siswa perlu penambahan fasilitas di setiap sekolah, terutama buku-buku pelajaran dan fasilitas internet. Fasilitas ini akan sangat membantu guru-guru untuk mengarahkan siswa dalam memberikan tugas-tugas yang memanfaatkan informasi dari berbagai sumber. Untuk meningkatkan kreatifitas siswa, guru-guru mendorong siswa membuat suatu karya yang bermanfaat sesuai mata pelajaran. Sebagai contoh untuk mata pelajaran Fisika, siswa dilatih membuat karya ilmiah yang berdasarkan hasil pengamatan mapuan kajian dari berbagai sumber. Pengamatan dapat dilakukan di laboratorium atau di lapangan. Berkaitan penggunaan laboratorium perlu ada laboran. Guru juga harus punya kompetensi dalam merancang praktikum dan juga kegiatan ilmiah mahasiswa. Untuk dapat meningkatkan kompetensi guru dan laboran dalam mengelola dan menggunakan peralatan laboratorium perlu dilakukan pelatihan atau lokarkarya.

Secara konkret, membangun iklim pembelajaran efektif perlu segera digalakkan. Untuk itu, warga sekolah dilibatkan langsung dalam *lesson study*. Untuk itu, guru didampingi dalam menganalisis pembelajaran di kelas. Setelah itu, guru dibina mempersiapkan perencanaan perangkat pembelajaran yang

sesuai dengan pokok bahasan salam pembelajaran, termasuk melatih guru dalam penerapannya. Agar tidak gugup/gagap, guru dilatih secara tertutup. Selanjutnya, potensi guru mengajar diberdayakan untuk melaksanakan pembelajaran. Akan tetapi, kebiasaan guru menutup diri dari luar akan dibuka. Pada saat inilah, baik guru, kepala sekolah, pengawas, bahkan komite dan kepala sekolah diperkenankan memberikan masukan pada pembelajaran yang teramati. Setelah itu, dialog untuk merefleksi kegiatan pun dilaksanakan. Pada saat inilah, keterbatasan siswa akan teridentifikasi, terungkap, bahkan teratasi oleh keterlibatan beragam pihak, baik orang tua, komite, pengawas, maupun dinas pendidikan.

### d. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Beberapa Guru yang mengajar tidak sesuai bidang keahliannya (*miss-match*), jumlah dan distribusi guru per mata pelajaran kurang merata. Hal ini disebabkan penerimaan guru tidak didasarkan pada analisis kebutuhan untuk setiap sekolah. Pihak pemerintah kabupaten dapat melakukan pemetaan tentang sebaran guru di setiap sekolah. Pemetaan mencakup jumlah guru yang sudah ada di setiap sekolah dan distribusi guru sesuai mata pelajaran. Dari hasil pemetaan ini dapat ditindaklanjuti dengan penerimaan guru sesuai kebutuhan dan mendistribusikan kembali guru-guru mata pelajaran yang berlebih di sekolah tertentu. Sebagai alternatif, setiap SMA yang kekurangan guru bidang studi tertentu melakukan kerja sama dengan SMP terdekat yang memiliki guru sebidang.

Sebagai ujung tombak, guru memang sulit dielakkan dari klaim “tumpul”. Indikator tentang itu sangat jelas. Pada awalnya, mereka tidak memiliki referensi mutakhir. Dalam kondisi itu, mereka biasa mengajarkan apa yang mereka tahu. Aktivitas sebagai pembaca referensi tidak mereka lakukan. Akibatnya, pengetahuan mereka tidak cepat berkembang. Selain itu, mereka berasal dari nonbindang keilmuan yang diajarkan. Kondisi itu menjadikan guru asal mengajar karena tidak memiliki bekal yang cukup. Alternatif pemberdayaan dan peningkatan mutu guru memang ditempuh.

Akan tetapi, besarnya jumlah guru menjadikan pemberdayaan guru mata pelajaran UN tidak efektif. Dari waktu ke waktu keadaan itu tidak segera teratasi sehingga berimbas pada peningkatan mutu layanan yang diberikan kepada siswa peserta UN.

Menghadapi persoalan ini, tim peneliti mendampingi guru mata pelajaran UN dalam ber-MGMP. Melalui pendampingan secara intensif, LPTK diharapkan dapat mendukung pencapaian standar kompetensi lulusan (SKL). Untuk kepentingan itu, guru-guru yang memiliki keterbatasan dalam bidang penguasaan substansi keilmuan dan praktik pembelajaran didampingi dalam diskusi keilmuan, sekaligus dibina dalam mengembangkan perencanaan pembelajaran. Agar kegiatan dapat terkoordinasi dengan baik, koordinasi dengan kepala sekolah ditingkatkan, termasuk dengan pihak pengawas sekolah. Dalam konteks ini, kepala sekolah dan pengawas diharapkan dapat mengintensifkan pemantauan untuk memperoleh rekaman pembelajaran guna perbaikan kinerja guru.

#### **e. Standar Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana perpustakaan beberapa sekolah kurang menunjang karena buku-buku sumber belajar yang relevan tidak memadai. Disamping itu, pada berapa sekolah tidak memiliki peralatan laboratorium IPA dan Bahasa yang memadai, serta kapasitas ruang yang tidak memadai. Faktor kekurangan sarana dan prasarana tampak pada kelangkaan buku-buku pelajaran dalam perpustakaan. Sangat ironis karena hal itu terjadi pada mata pelajaran UN. Siswa sulit mencari buku pendukung, apalagi buku pokok yang mereka perlukan. Jika ada pada guru, buku yang sudah lama pun diandalkan. Padahal, isinya sudah berkembang. Dalam keadaan itu, guru memberikan solusi fotokopi pada pokok bahasan tertentu. Akan tetapi, jumlahnya terbatas jika dibandingkan dengan luasnya lingkup materi UN. Akibatnya, ada ketidakmutakhiran informasi. Selain itu, prasarana berupa lingkungan yang tidak tertata rapi menjadikan suasana ruang belajar tidak nyaman, termasuk ketika berdiskusi tentang materi UN.

Ketidaknyamanan siswa belajar yang disebabkan oleh ketidaktersediaan lingkungan

yang sehat akan dikomunikasikan kepada komite sekolah. Ketika menghadapi keadaan itu, besar kemungkinan mereka akan memedulikannya. Untuk itu, tim peneliti akan mendampingi interaksi dewan guru dan komite sekolah, sekaligus meninjau lingkungan sekolah dimaksud agar tidak menimbulkan bias informasi. Akan tetapi, ketidaknyamanan belajar yang dipicu oleh ketidaktersediaan buku pelajaran, baik buku pendukung maupun buku utama akan dipersiapkan pendampingan penulisan buku ajar yang kontekstual bagi para siswa. Dalam hal ini, pendampingan dilakukan mulai perencanaan, pencetakan, bahkan penerapannya. Sudah tentu, tim peneliti juga akan melibatkan ahli perbukuan untuk menelaah kelayakan buku yang akan diterapkan pada satuan pendidikan tertentu.

Melengkapi kekurangan fasilitas tersebut, perlu dilakukan pendataan kembali fasilitas yang tersedia di setiap sekolah dan fasilitas apa saja yang dibutuhkan paling mendesak. Kekurangan fasilitas pada setiap Sekolah perlu dialokasikan secara bertahap oleh pemerintah daerah. Sebagai alternatif, sekolah yang kekurangan fasilitas laboratorium perlu melakukan kegiatan kunjungan ke sekolah-sekolah yang memiliki laboratorium IPA dan Bahasa yang lengkap. Disamping itu, pada setiap akhir semester dapat dilakukan program karyawisata ke berbagai laboratorium IPA dan laboratorium bahasa di Universitas Tadulako.

#### **f. Standar Pengelolaan**

Setiap kali menjelang UN, seluruh warga sekolah seolah-olah sibuk secara totalitas. Kepala sekolah memberikan instruksi kepada dewan guru agar menyusun jadwal pembelajaran tambahan. Siswa diminta menyiapkan diri hadir pada jam di luar jam efektif. Guru tidak boleh membolos karena semakin mendekati UN. Gambaran proses itu menunjukkan bahwa kepala sekolah, guru, dan siswa sebenarnya tidak menyiapkan diri sejak awal. Mereka menyongsong UN dalam keadaan yang cemas karena kurang waktu. Akibatnya, manajemen seolah hanya terfokus pada UN. Sementara itu, materi lain kurang diperhatikan. Padahal, materi non-UN juga diperlukan untuk meningkatkan



kualitas alumni sekolah ketika memasuki masyarakat.

Manajemen dalam penyelenggaraan sekolah sebagai sistem (input, proses, output) masih bersifat parsial, dimana lebih mengutamakan output (kuantitas) dari pada proses (kualitas) dan input (sumberdaya). Peran Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten lebih dominan dari pada Kepala Sekolah dalam penyelenggaraan UN. Khususnya dalam menyiapkan kurikulum tidak dilakukan secara terprogram oleh sekolah.

Keadaan itu perlu diberi solusi yang tepat, yakni meningkatkan pengelolaan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP). Pada kesempatan ini, ketika MGMP dilakukan pada awal semester, pendampingan tim peneliti dari LPTK terhadap guru pelajaran dapat difokuskan untuk merancang program pembelajaran selama satu semester, bahkan satu tahun. Dengan begitu, perhitungan dan pemanfaatan jam belajar diharapkan dapat dioptimalkan untuk perencanaan, pelaksanaan, bahkan penilaian pembelajaran secara efektif. Pengelolaan yang baik semestinya dilakukan dengan perencanaan yang tertib pula. Berdasarkan hasil penelitian kasus pembelajaran di lapangan, tampak bahwa ketergesa-gesaan kepala sekolah, guru, dan siswa dalam menyongsong UN terletak pada ketidakmampuannya mengelola kegiatan akademik.

Dalam penyelenggaraan kegiatan sekolah sebaiknya kepala sekolah mengkoordinasikannya dengan guru-guru. Kepala sekolah bersama guru-guru dapat merancang program kegiatan yang berbasis sekolah, diantaranya: program pemanfaatan bersama sumberdaya yang tersedia di sekolah yang memiliki fasilitas lengkap; program karyawisata ke perguruan tinggi atau lembaga yang memiliki fasilitas yang relevan dengan kebutuhan pembelajaran di SMA, dan program pengembangan atau adaptasi kurikulum. Kurikulum sebaiknya dilokaryakan ditingkat sekolah dengan mengundang narasumber kompeten. Narasumber dapat berasal dari guru atau pengawas atau Dosen. Lokakarya diharapkan akan menghasilkan kurikulum yang berbasis pada kondisi lingkungan sekolah. Selain kegiatan ditingkat sekolah dapat juga dilakukan kegiatan di tingkat kabupaten.

Misalnya lokakarya MBS untuk mengoptimalkan sistem manajemen sekolah.

#### **g. Standar Pembiayaan**

Pembiayaan di sekolah belum optimal menyediakan alokasi khusus untuk pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan RKA-S. Hal tersebut menyebabkan rendahnya kompetensi guru dalam aspek pedagogik dan profesional. Untuk meningkatkan kompetensi guru tersebut perlu dialokasikan anggaran untuk pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan oleh pemerintah.

Sekolah yang akan berkembang dengan baik memang tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan dana. Sebagian SMA di Provinsi Sulawesi Tengah tidak dapat berkembang dengan cepat karena kendala dana. Sebagai gambaran, sekolah memang mengetahui bahwa perpustakaan dan perbukuan merupakan hal yang penting. Akan tetapi, ketika sekolah akan mengusahakannya sendiri, upaya itu terbatas dan terbentur pada keterbatasan dana. Jika melibatkan orang tua siswa, guru juga terbatas pada aturan bahwa tidak dibenarkan melakukan pungutan. Akibatnya, keterbatasan akan referensi berdampak langsung pada tinggi rendahnya hasil UN dari tahun ke tahun.

Memecahkan permasalahan tersebut, pihak sekolah perlu di damping ketika bermusyawarah dengan komite sekolah, sekaligus dengan dinas pendidikan. Setiap pihak akan diperlihatkan pada tuntutan kebutuhan siswa dan realita potensi pendanaan yang tersedia, baik pendanaan dari pemerintah maupun pendanaan dari orang tua. Secara rasional, sudah tentu ada perhitungan normatif yang wajar sehingga pendanaan tidak boleh lebih dari kemampuan yang dimiliki orang tua. Akan tetapi, hal itu tidak berarti bahwa pembiaran kebutuhan sarana dan prasarana belajar siswa harus diterlantarkan. Dalam konteks itulah, pemberdayaan guru sebagai penulis buku ajar diperlukan agar dapat meminimalkan kebutuhan dana untuk penyiapan buku ajar siswa.

## **h. Standar Penilaian**

Meskipun kisi-kisi dan tes yang disusun oleh guru masing-masing dalam kategori cukup dan baik, namun perangkat tersebut belum setara dengan perangkat evaluasi UN. Penjabaran dari SK/KD ke indikator pembelajaran sampai indikator soal memiliki kualitas yang masih rendah. Penilaian sangat berkaitan dengan proses pembelajaran. Penilaian merupakan umpan balik bagi guru dan siswa. Bagi guru merupakan masukan untuk melakukan perbaikan pembelajaran berikutnya, dan bagi siswa menjadi masukan untuk lebih giat belajar bagi yang masih kurang dan menjadi motivasi bagi yang nilainya sudah bagus untuk meningkatkan kemampuannya. Karena itu pengembangan perangkat penilaian tidak dapat dipisahkan dari pengembangan perangkat pembelajaran dan merancang pembelajan.

Sebelum pelaksanaan UN, keberhasilan pembelajaran cenderung diukur secara tradisional. Secara praktis, mereka biasa dihadapkan pada proses memilih salah satu jawaban yang benar dari sekian jawaban yang tersedia. Mereka tidak biasa diminta menalar dan menemukan pemecahan masalah. Dalam keadaan demikian, balikan atau kritikan yang membangun untuk mencerahkan kesulitan siswa tidak dilakukan segera setelah ujian berlangsung. Akibatnya, siswa berhenti pada ketidakpahaman dan ketidaktahuannya. Evaluasi tidak terfungsikan untuk memberikan koreksi pada kemajuan dan kecepatan belajar siswa.

Sebaliknya, evaluasi cenderung menjadikan siswa rajin menghafal, bukan menalar.

Menjawab persoalan itu, guru pelajaran UN perlu didampingi dalam memilih soal-soal yang layak digunakan untuk pelatihan sehari-hari, misalnya. Akan tetapi, guru pelajaran UN juga perlu didampingi untuk menyusun soal-soal yang sesuai dengan kompetensi dasar yang ditentukan. Perpaduan proses pengembangan kompetensi guru dalam merancang evaluasi yang standar tersebut akan berdampak positif.

Dalam hal ini, guru pelajaran UN akan memiliki pemahaman yang tepat untuk mengevaluasi kemampuan siswa dengan alat yang tepat. Siswa yang mengerjakan soal-soal pelajaran UN akan merasa senang, bukan sedih karena ada tantangan untuk mengungkap kemampuannya. Ini berarti bahwa kejenuhan belajar dan berlatih mengerjakan latihan soal-soal pelajaran UN akan sirna karena terdorong untuk meraih sukses yang lebih tinggi.

Agar guru-guru memiliki kemampuan yang memadai dalam menyusun instrumen penilaian dalam level UN, perlu ada kegiatan rutin yang dapat memfasilitasi guru-guru untuk berlatih menyusun instrumen tersebut. Kegiatan ini dapat melalui MGMP, dimana guru-guru saling memberikan masukan atau mengundang pakar asesmen dari perguruan tinggi.

Rangkuman tentang faktor penyebab rendahnya hasil UN dan alternatif pemecahannya disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 1. Faktor Penyebab dan Alternatif Pemecahan**

No	Standar Pendidikan	Faktor Penyebab	Alternatif Pemecahan
1	Standar Isi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementasi Kurikulum Belum Optimal</li> <li>• Silabus dan RPP tidak disusun oleh guru tetapi menggunakan silabus dan RPP dari penerbit tertentu. Hal ini mengakibatkan media dan bahan yang tercantum dalam RPP tidak sesuai dengan kondisi sekolah seperti bahan dan peralatan yang diperlukan tidak tersedia.</li> </ul>	Pendampingan pengembangan Silabus, RPP, LKS, Media dan Assemen
2	Standar Proses	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan pembelajaran belum berjalan secara optimal (penggunaan media, pemilihan metode, model dan pendekatan, pelaksanaan praktikum dan lain-lain</li> <li>• Pelaksanaan pembelajaran umumnya tidak dilengkapi dengan perangkat pembelajaran</li> <li>• Pemanfaatan IT belum dalam proses pembelajaran masih jarang digunakan</li> </ul>	Pendampingan penulisan bahan ajar, pembuatan modul praktikum, dan penerapan model, pendekatan pembelajaran, serta penggunaan IT dalam pembelajaran
3	Standar Kompetensi Lulusan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan SKL belum optimal</li> <li>• Sistem penentuan kenaikan kelas dan kelulusan belum memenuh standar</li> <li>• Wawasan pengetahuan siswa sangat kurang yang sebabkan oleh siswa belajar hanya berdasarkan buku yang digunakan oleh guru, guru yang kurang memberikan tugas untuk mencari informasi dari berbagai sumber.</li> <li>• Umumnya guru/kepala sekolah belum menyusun standar kelulusan</li> </ul>	Siswa diberikan tugas-tugas yang materinya berasal dari berbagai sumber, seperti jurnal ilmiah, internet dan lain-lain. Dalam rencana pembelajaran dilakukan kegiatan untuk membuat karya kreatif dan dilatih mempresentasikan hasilnya di depan kelas
4	Standar Pendidik dan tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih banyak guru yang mengajar tidak sesuai dengan bidang studinya, jumlah dan distribusinya tidak merata</li> <li>• Banyak guru belum mampu mengajar dengan baik</li> <li>• Tidak ada laboran dan pustakawan</li> <li>• Kemampuan guru melakukan penilaian rendah</li> </ul>	Pengangkatan guru disesuaikan dengan kebutuhan guru mata pelajaran. Pengangkatan teknisi dan laboran serta pustakawan.
5	Standar Sarana dan prasarana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarana prasarana masih sangat minim (media, buku, peralatan laboratorium, ruang belajar, mobiler dan lain-lain)</li> </ul>	Pengadaan buku pelajaran, peralatan dan ruangan laboratorium IPA, IT
6	Standar Pengelolaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan sekolah belum sesuai dengan konsep MBS</li> <li>• Manajemen monitoring dan evaluasi belum berjalan sebagaimana yang di harapkan, serta Frekuensi monitoring proses belajar mengajar oleh kepala sekolah relatif rendah</li> <li>• Pelibatan semua stakholder belum optimal</li> <li>• Sistem penerimaan siswa baru belum memenuhi standar</li> <li>• Manajemen dalam penyelenggaraan sekolah sebagai system masih bersifat parsial, dengan mengutamakan output daripada proses dan input</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokakarya MBS tingkat Kabupaten/kota untuk meningkatkan manajemen sekolah.</li> <li>• Meningkatkan kualitas monitoring pembelajaran di kelas</li> </ul>
7	Standar pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan RABS belum memenuhi standar</li> <li>• Standar pembiayaan masih sangat minim</li> <li>• Pengelolaan keuangan belum menyangkut sistem transportasi dan akuntabilitas</li> <li>• Tidak ada alokasi anggaran untuk pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan</li> </ul>	Setiap Tahun dialokasikan anggaran untuk membiayai guru-guru mengikuti pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensinya

8	Standar Penilaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemampuan guru menyusun alat evaluasi yang setara UN masih rendah</li> <li>• Pelaksanaan penilaian belum dilaksanakan secara optimal</li> <li>• Asesmen yang dibuat guru hanya mengukur tingkat kognitif siswa</li> <li>• Sistem penilaian belum dilaksanakan secara benar obyektif dan bertanggung jawab.</li> </ul>	Pendampingan penyusunan asesmen untuk mengukur afektif dan psikomotor, dan pelatihan menyusun soal ujian yang setara dengan UN
---	-------------------	--	--

**Tabel 2. Model Peningkatan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah**

No	Nama Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjab	Mekanisme Kerja dan Penjadwalan
1	Pendampingan pengembangan Silabus, RPP, LKS, Media dan Assesmen	Meningkatkan kemampuan guru-guru dalam mengembangkan perangkat pembelajaran	Meningkatkan kemampuan guru-guru menyusun RPP, Silabus, LKS dan merancang materi pembelajaran Guru-guru dapat mengembangkan berbagai asesmen	Disdik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap tahun dinas pendidikan membuat perencanaan kegiatan lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran</li> <li>2. Melibatkan perguruan tinggi sebagai narasumber</li> </ol>
2	Pendampingan penulisan bahan ajar, pembuatan modul praktikum, berbasis IT	Meningkatkan kemampuan guru-guru dalam mengembangkan model dan pendekatan pembelajaran yang berbasis IT	Meningkatkan kemampuan guru-guru menyusun materi pembelajaran Guru-guru dapat mengembangkan berbagai model dan pendekatan pembelajaran berbasis IT	Disdik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap tahun dinas pendidikan membuat perencanaan kegiatan lokakarya pengembangan model pembelajaran</li> <li>2. Melibatkan perguruan tinggi sebagai narasumber</li> </ol>
3	Lokarya Lesson study	Meningkatkan kemampuan Guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran	Kemampuan guru-guru dalam merancang pembelajaran meningkat Mampu mengimplementasi-kan pembelajaran dengan baik	Disdik/ Kepsek	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lokarya teknis pelaksanaan lesson study</li> <li>2. Setiap sekolah melaksanakan lesson study</li> <li>3. Evaluasi terhadap pelaksanaan lesson study di sekolah</li> </ol>

4	Lokakarya penggunaan dan pengelolaan laboraturium IPA, IT dan bahasa	Meningkatkan kemampuan guru IPA mengintegrasikan percobaan dalam struktur pembelajarandi kelas Meningkatkan kemampuan guru Bahasa dalam menggunakan peralatan laboraturium bahasa Meningkatkan kemampuan guru dalam menggunakan IT untuk pembelajaran	Meningkatnya kemampuan guru IPA mengintegrasikan percobaan dalam struktur pembelajarandi kelas Meningkatkan kemampuan guru Bahasa dalam menggunakan peralatan laboraturium bahasa Meningkatkan kemampuan guru dalam menggunakan IT untuk pembelajaran	Kepala Sekolah dan Dinas Pendidikan	1. Lokarya penggunaan dan pengelolaan lab. IPA , IT dan Bahasa 2. Monitoring dan evaluasi
---	--	---	---	-------------------------------------	--

## SIMPULAN DAN SARAN

MGMP dengan dukungan perguruan tinggi melalui pengabdian kepada masyarakat.

### Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

- Peta kompetensi siswa SMA di Kabupaten Buol dan Tolitoli telah diperoleh dengan menampilkan SK/KD yang pencapaiannya berada dalam kategori rendah. Aspek konsistensi pencapaian tersebut sulit disajikan karena SK/KD yang diujikan setiap tahun berbeda. Terdapat SK/KD yang pencapaian sangat rendah pada setiap mata pelajaran, yakni rata-rata di bawah 10%.
- Faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian kompetensi siswa dalam UN adalah: kemampuan guru mengembangkan perangkat pembelajaran pada aspek kuantitatif dalam kategori sangat baik. Namun untuk aspek yang bersifat kualitatif, berada dalam kategori cukup.
- Model alternatif pemecahan masalah yang dapat diajukan antara lain: optimalisasi peran MGMP yang berfokus pada peningkatan kapasitas guru dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran, *Lesson Study*, lokakarya penyusunan perangkat pembelajaran dan Bimtek penyusunan tes setara UN.
- Model implementasi pemecahan masalah mencakup komponen: perencanaan bersama di dinas pendidikan dan revitalisasi peran

### Saran

Beberapa aspek yang ditemukan dalam penelitian ini terutama faktor yang berpengaruh teradap pencapaian kompetensi siswa, tidak berada dalam jangkauan kewenangan peneliti maka saran berikut berfokus pada hal-hal sebagai berikut:

- Diperlukan distribusi guru di setiap sekolah yang merata menurut bidang studi. Pengangkatan guru disesuaikan dengan kebutuhan guru bidang studi yang dianggap prioritas. Kerjasama antar sekolah dalam mengatasi kekurangan guru bidang studi yang dibutuhkan.
- Perlu pemerataan dalam hal pengadaan buku pelajaran, peralatan laboratorium IPA, IT dan bahasa, penambahan atau pengadaan ruang laboratorium IPA, IT dan bahasa.
- Sekolah dapat melakukan kunjungan ke sekolah lain atau perguruan tinggi/lembaga yang memiliki perpustakaan dan laboraturium yang memadai.
- Anggaran untuk pembiayaan pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan, khususnya dalam meningkatkan kompetensi pedagogik dan professional mereka perlu dialokasikan secara berkesinambungan.
- Peningkatan mutu pendidikan ditentukan oleh kualitas kinerja sumber daya manusia,

yakni tenaga pendidik dan kependidikan. Lemahnya mutu pendidikan pada tingkat SMA diduga muncul karena lemahnya pengawasan. Oleh karena itu, pemerintah pusat perlu melakukan pembinaan terhadap para pendidik dan tenaga kependidikan secara komprehensif.

- f) Bagi Dinas Pendidikan Provinsi sebagai tindak lanjut dari kebijakan tentang pentingnya sumber daya manusia yang berkualitas, penerimaan tenaga pendidik dan kependidikan perlu dilakukan secara selektif. Untuk itu, uji kompetensi sepatutnya tidak hanya pada aspek teoretis, tetapi dilakukan terhadap aspek

keterampilan. Di samping itu, penerimaan tenaga pendidik dan kependidikan juga perlu dilihat dari aspek afektif, misalnya aspek kesiapan mental, kemahiran berbahasa, dan kemahiran menalar.

- g) Peta kompetensi siswa SMA pada setiap mata pelajaran yang diujikan dalam Ujian Nasional menunjukkan prestasi yang rendah. Fenomena itu jelas berkenaan langsung dengan kualitas pembelajaran. Dalam kasus ini, dinas pendidikan kabupaten/kota perlu membuka problem internal dan eksternal sekolah kepada pihak luar.

## DAFTAR RUJUKAN

- Assumption University –Thailand, 2001. *Quality Assurance Manual, AuQS 2000 Center for Excellence*.
- Brennan, J. and Shah, T. 2000. *Managing Quality in Higher Education*, OECD, SRHE and Open University Press, Buckingham.
- Delors, J. tanpa tahun. *Learning : The Treasure Within*, Report to UNESCO of the International Commission on Education for the 21st Century.
- Depdiknas. 2002. *Buku Pedoman Evaluasi Diri*. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
- Depdiknas. 2003. *Buku Pedoman Penjaminan Mutu (Quality Assurance) Pendidikan Tinggi*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas.
- Depdiknas. 2004. *Praktek Baik dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Buku I Proses Pembelajaran*. Departemen Pendidikan Nasional – Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan. Jenderal PerguruanTinggi - Departemen Pendidikan Nasional.
- Depdiknas. 2010. *Panduan Kebijakan Pemanfaatan Hasil Ujian Nasional Untuk Perbaikan Mutu Pendidikan*, Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan, Jakarta.
- Directorate General of Higher Education, 2003 – 2010. *Higher Education Long Term Strategy (HELTS)*.
- Edward S. 1993. *Total Quality Management In Education*, Kogan Page, Philadelphia – London.
- Goedegebuure, et.al. 1993. *Higher Education Policy : An International and Comparative Perspective*, Oxford : Pergamon Press.
- Goodlad, S. 1995. *The Quest for Quality*, SRHE and Open University Press, Buckingham.
- <http://indonews.org/11-443-siswa-smu-tak-lulus-ujian-nasional/>, diakses 21 Mei 2011.
- Idrus, N., U. Buchara, Sukisno dan Jones, M. 2000. *Quality Assurance Handbook third edition*, Engineering Education Development Project, Directorate General of Higher Education.
- Liston, C. 1999. *Managing Quality Standards*, Open University Press, Buckingham, Philadelphia.
- Martin J.Campbell. 1993. *The Successful Engineer:Personal and Personal Skills : a*

- Source book. New York:McGraw-Hill International Editions.*
- McCuen, Richard H. 1996. *The Elements of Academic Research*. New York: ASCE Pre.
- Sallis, E. 1993. *Total Quality Management in Education*, Kogan Page Limited, London.
- Sallis, E and Jones,G. 2002. *Knowledge Management in Education*, Kogan Page Limited, London.
- Sinclair Goodlad, 1995. *The Quest for Quality*, The Society for Research into Higher Education & Open University Press.
- Sulistiyani. A. T. (Editor), 2004. *Memahami Good Governance dalam Perspektif Sumberdaya Manusia*. Penerbit Gava Media. Yogyakarta.